

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Responsiviness Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Desa Bojong Kulon

Moh Abdul Azis ¹, Itat Tatmimah ², Muzayyanah³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia
Email: muzayyanah@umc.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Bojong Kulon. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden yang merupakan kepala keluarga di desa tersebut. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan responsivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan akuntabilitas justru berpengaruh negatif signifikan. Responsivitas merupakan variabel yang paling dominan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas yang tidak disertai keterlibatan dan komunikasi yang terbuka dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa perlu didukung oleh transparansi informasi dan responsivitas yang tinggi dari aparat desa.

Kata kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas pengelolaan Dana Desa, Tingkat Kepercayaan Masyarakat*

Abstract

This study aims to analyze the influence of accountability, transparency, and responsiveness in the management of village funds on the level of public trust in Bojong Kulon Village. The research employed a descriptive quantitative method with a survey approach using questionnaires distributed to 100 respondents who are heads of households in the village. The data were analyzed using multiple linear regression. The results indicate that transparency and responsiveness have a positive and significant effect on public trust, while accountability has a significant negative effect. Responsiveness is identified as the most dominant variable in building public trust. The implications of these findings suggest that accountability practices, when not accompanied by active community involvement and open communication, may lead to negative public perceptions. Therefore, enhancing public trust in the management of village funds requires strong information transparency and high responsiveness from village officials.

Keywords: *Accountability, Transparency, Responsiveness in Village Fund Management, Public Trust Level*

Pendahuluan

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel, konsep Good Governance menjadi pedoman utama yang harus diterapkan oleh setiap entitas pemerintahan, termasuk pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa merupakan entitas hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya. Dengan adanya kewenangan dan dukungan dana yang signifikan, desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan (Sofyani & Tahar, 2021). Seiring dengan itu, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Regulasi ini menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran dalam setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem keuangan desa yang efisien dan mampu dipertanggungjawabkan secara publik. Dalam konteks pendanaan, Dana Desa yang merupakan bagian dari APBN terus mengalami dinamika alokasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp71 triliun dengan rata-rata Rp940 juta per desa (Kemenkeu, 2024). Di Desa Bojong Kulon, tercatat bahwa alokasi dana pada tahun 2022 sebesar Rp1.079.105.000, meningkat pada 2023 menjadi Rp1.124.119.000, namun menurun kembali menjadi Rp993.170.000 di tahun 2024 (Data Statistik Desa Bojong Kulon, 2024). Fluktuasi ini menjadi perhatian masyarakat, terlebih ketika transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut dianggap masih rendah.

Wawancara awal yang dilakukan dengan warga menunjukkan adanya keraguan masyarakat terhadap pengelolaan dana oleh pemerintah desa, khususnya karena tidak adanya publikasi APBDes dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara harapan masyarakat dengan praktik pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa

(Azizah & Kholifah, 2023). Menurut teori legitimasi, keberlanjutan suatu organisasi atau pemerintahan sangat bergantung pada penerimaan dan dukungan masyarakat. Pemerintah desa harus memenuhi ekspektasi publik melalui praktik tata kelola yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku (Deegan, 2002; Aprilia, 2019). Dalam konteks ini, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas menjadi tiga pilar utama yang memengaruhi kepercayaan masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan dan partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik (Beshi & Kaur, 2020; Mansoor, 2021). Namun demikian, terdapat studi yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan, terutama ketika informasi yang disajikan tidak mudah dipahami atau dianggap tidak valid oleh masyarakat (Aprilia, 2019; Imawan & Purwanto, 2020). Sementara itu, responsivitas atau kemampuan pemerintah desa dalam merespon kebutuhan masyarakat juga menjadi indikator penting dalam menumbuhkan rasa percaya (Mochtar et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan Dana Desa memengaruhi kepercayaan masyarakat. Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Bojong Kulon untuk menjawab ketidakpastian yang masih muncul dalam temuan sebelumnya, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem tata kelola keuangan desa yang berbasis partisipasi dan keterbukaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara objektif melalui data numerik yang diolah dengan teknik statistik. Menurut Sahir (2022), pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif memanfaatkan teknik statistik dan berbagai alat analisis data untuk mengolah informasi, sehingga hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk angka-angka yang dapat diinterpretasikan. Selain itu, Sugiyono (2018) menyebutkan bahwa metode kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu.

Proses penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data menggunakan instrumen terstruktur yang kemudian dianalisis secara statistik guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepercayaan masyarakat, yang didefinisikan sebagai keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, khususnya dalam hal kejujuran, keterbukaan, dan integritas pengelola.

Peppers dan Rogers (2018) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat dapat dilihat dari kesediaan mereka untuk mengikuti aturan, berpartisipasi aktif dalam program pemerintah, serta mendukung kebijakan yang diterapkan. Indikator untuk variabel ini mencakup persepsi bahwa dana desa digunakan sesuai aturan, pengelola bekerja jujur dan adil, dukungan terhadap pejabat desa, kepercayaan terhadap sistem pengawasan, serta keyakinan bahwa dana dikelola untuk kepentingan bersama. Adapun variabel independen terdiri dari tiga aspek utama: akuntabilitas, transparansi, dan responsiveness. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pihak pengelola untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan stakeholder lainnya.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas mencakup pelaporan berkala, aksesibilitas laporan keuangan, kesesuaian penggunaan dana dengan rencana, profesionalisme pengelola, serta keterlibatan masyarakat dalam penilaian kinerja. Transparansi, menurut Nordiawan (2010), adalah prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat, yang ditandai dengan keterbukaan informasi dana desa, kejelasan mekanisme penyaluran, dan kemudahan pemahaman data penggunaan dana. Responsiveness, atau daya tanggap, menggambarkan sejauh mana pemerintah desa responsif terhadap kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat, serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, yang berjumlah sebanyak 467 KK. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria

tertentu. Adapun kriteria responden adalah kepala keluarga yang berdomisili di Desa Bojong Kulon, berusia minimal 17 tahun, dan memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa. Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 83 responden.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 hingga 20 September 2025 di Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan kuesioner tertutup, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen desa, literatur, jurnal, dan sumber lain yang relevan. Instrumen penelitian berupa kuesioner menggunakan skala Likert 5 tingkat, di mana responden memberikan penilaian dari “sangat tidak setuju” (skor 1) hingga “sangat setuju” (skor 5). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan standar deviasi. Sebelum melakukan uji regresi, dilakukan terlebih dahulu pengujian kualitas data melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan setiap item dengan skor total, dan item dinyatakan valid jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai korelasi $> 0,5$. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach’s Alpha, dan kuesioner dianggap reliabel jika nilai alpha $\geq 0,6$.

Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model regresi, yaitu uji normalitas (dengan Kolmogorov–Smirnov), uji multikolinearitas (dengan nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10), serta uji heteroskedastisitas (dengan uji Glejser, sig $> 0,05$). Setelah asumsi terpenuhi, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan maupun parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepercayaan masyarakat

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

X_3 = Responsiveness

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

e = Error

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepercayaan masyarakat dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk melihat sejauh mana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji t menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sementara itu, nilai R^2 yang semakin tinggi menunjukkan bahwa model semakin baik dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini melibatkan 100 responden dari masyarakat Desa Bojong Kulon. Berdasarkan karakteristik responden, diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 63 orang (63%), sedangkan responden perempuan berjumlah 37 orang (37%). Dari sisi latar belakang pendidikan, responden paling banyak berasal dari jenjang SMA/SMK sebanyak 51 orang (51%), disusul oleh lulusan SD sebanyak 26 orang (26%), SMP sebanyak 20 orang (20%), D3 sebanyak 1 orang (1%), dan S1 hingga S3 sebanyak 2 orang (2%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan menengah. Sementara itu, dari segi lama tinggal, mayoritas responden telah menetap di Desa Bojong Kulon selama lebih dari 20 tahun, yaitu sebanyak 66 orang (66%). Sebanyak 26 orang (26%) telah tinggal selama 10–20 tahun dan hanya 8 orang (8%) yang tinggal kurang dari 10 tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar

responden merupakan warga tetap yang memahami secara mendalam kondisi desa, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menggunakan statistik deskriptif menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap variabel akuntabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 19,66, dengan nilai minimum 13 dan maksimum 25 serta standar deviasi sebesar 2,815. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dinilai cukup baik. Untuk variabel transparansi, nilai rata-rata adalah 19,42 dengan standar deviasi sebesar 2,982, yang menunjukkan persepsi yang cukup positif terhadap keterbukaan informasi desa. Variabel responsivitas memiliki nilai rata-rata sebesar 19,61 dengan standar deviasi sebesar 2,708, menandakan masyarakat menilai pengelola desa cukup tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Adapun variabel kepercayaan masyarakat memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 20,02 dengan standar deviasi 2,712, yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa berada pada kategori tinggi.

Uji validitas terhadap semua item pertanyaan menunjukkan bahwa nilai korelasi r hitung lebih besar dari r tabel (0,196), sehingga semua instrumen dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6, sehingga instrumen dinyatakan reliabel dan konsisten. Uji asumsi klasik juga telah dilakukan untuk memastikan kelayakan model regresi. Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 ($>0,05$) sehingga data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 untuk semua variabel, artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser juga menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikansi lebih dari 0,05, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,028 - 0,358X_1 + 0,234X_2 + 0,790X_3 + e$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X_1) berpengaruh negatif terhadap kepercayaan masyarakat, di mana setiap peningkatan akuntabilitas sebesar satu satuan justru menurunkan kepercayaan masyarakat sebesar 0,358

satuan. Sebaliknya, transparansi (X_2) berpengaruh positif sebesar 0,234 dan responsivitas (X_3) berpengaruh paling kuat dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, yaitu sebesar 0,790. Artinya, peningkatan transparansi dan responsivitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan peningkatan akuntabilitas—dalam konteks ini—justru cenderung menurunkan kepercayaan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya persepsi negatif masyarakat terhadap prosedur akuntabilitas yang mungkin dirasa tidak transparan atau terlalu birokratis.

Uji koefisien determinasi (R^2) nilai Adjusted R Square sebesar 0,519, yang berarti 51,9% variasi kepercayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen (akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas), sedangkan sisanya 48,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Uji t secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan namun negatif terhadap kepercayaan masyarakat dengan nilai signifikansi 0,001 ($<0,05$). Transparansi berpengaruh positif signifikan dengan nilai signifikansi 0,010 ($<0,05$), dan responsivitas memiliki pengaruh paling signifikan dan positif terhadap kepercayaan masyarakat dengan nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel responsivitas menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Bojong Kulon..

Pembahasan

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Artinya, semakin tinggi akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa justru diikuti dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Temuan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa proses akuntabilitas yang diterapkan belum sesuai dengan harapan masyarakat, misalnya terlalu formal atau hanya bersifat administratif. Dalam konteks teori legitimasi, pemerintah desa memerlukan dukungan masyarakat untuk mempertahankan legitimasi atas kewenangan yang dimilikinya. Akuntabilitas seharusnya menjadi sarana untuk membuktikan bahwa pemerintah desa bertindak

sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat. Namun, apabila proses akuntabilitas tidak dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan komunikatif, maka masyarakat bisa merasa tidak dilibatkan, sehingga kepercayaan justru menurun dijalankan (Azizah & Kholifah R, 2023). Hal ini mencerminkan bahwa legitimasi tidak cukup dibangun hanya melalui pelaporan atau prosedur, tetapi juga melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa.

Hasil ini sejalan dengan temuan Arfiansyah (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas yang tidak disertai transparansi dan pelibatan publik dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas yang hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif tanpa adanya komunikasi terbuka dan pelibatan masyarakat secara aktif, cenderung dipersepsi negatif oleh publik. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki kendali atau akses terhadap informasi, sehingga memperlemah kepercayaan terhadap aparatur desa. Temuan senada juga dikemukakan oleh Sofyani & Tahar (2021), yang menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh seberapa besar mereka merasa dilibatkan dan mendapat informasi secara jelas. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Pratolo et al. (2022) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas secara langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, selama proses tersebut dilakukan secara menyeluruh, partisipatif, dan menyentuh aspek substansi, bukan hanya formalitas. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Beshi & Kaur (2020) menambahkan bahwa masyarakat akan menaruh kepercayaan lebih tinggi jika mereka merasa pemerintah desa terbuka dalam pengambilan keputusan dan mampu menunjukkan integritas dalam penggunaan dana publik. Dengan demikian, dalam kerangka legitimasi, penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa akuntabilitas dilakukan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mempertahankan kepercayaan dan dukungan masyarakat.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat

Hasil transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat menaruh perhatian terhadap keterbukaan informasi dan mengapresiasi akses terhadap proses serta hasil pengelolaan dana publik. Dalam pandangan teori legitimasi, transparansi menjadi instrumen penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Legitimasi akan lebih mudah diperoleh ketika pemerintah desa bersedia membuka diri kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan akurat, maka kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan desa akan meningkat (Malinda et al., 2024). Transparansi membantu mengurangi asimetri informasi yang dapat menimbulkan kecurigaan dan persepsi negatif dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofyani & Tahar (2021) dan Mansoor (2021) yang menyatakan bahwa transparansi dalam penyampaian informasi dapat memperkuat legitimasi pemerintah desa, sekaligus meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik dikelola, sehingga muncul rasa percaya terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian lain oleh Beshi & Kaur (2020) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin rendah potensi kecurigaan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana desa, yang pada akhirnya memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan temuan Angelia Aprilia (2019), yang menyatakan bahwa transparansi tidak selalu berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat apabila informasi yang disampaikan bersifat teknis, sulit diakses, atau tidak dipahami oleh warga secara luas. Dalam situasi tersebut, keterbukaan justru bisa menimbulkan kebingungan atau bahkan kecurigaan, terutama jika masyarakat tidak dibekali dengan literasi yang memadai untuk menafsirkan informasi keuangan. Senada dengan itu, Azizah & Kholifah R (2023) menambahkan bahwa transparansi harus didukung dengan media komunikasi yang efektif serta kesiapan perangkat desa dalam menjelaskan informasi secara terbuka dan berkelanjutan agar benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan

legitimasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah desa perlu memastikan bahwa transparansi tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga secara substansial, dengan memberikan informasi yang mudah dipahami, tepat waktu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Pengaruh Responsivitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Penelitian ini menemukan bahwa responsivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,790 menunjukkan bahwa semakin tinggi responsivitas pemerintah desa dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Responsivitas yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam mendengarkan, memahami, dan merespons persoalan publik dengan cepat dan tepat. Dalam kerangka teori legitimasi, responsivitas menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Pemerintah desa yang responsif dianggap memiliki komitmen untuk melayani kepentingan publik secara aktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa keluhan dan kebutuhan mereka didengar dan ditindaklanjuti, maka rasa percaya terhadap pemerintah desa akan tumbuh secara alami (Mochtar et al., 2022). Hal ini memperkuat posisi pemerintah sebagai pihak yang layak dipercaya dan diberi mandat dalam pengelolaan dana desa.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Hartanto et al. (2021) dan Hafid Risalbi et al. (2021), yang menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah desa memiliki peranan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Ketika pemerintah tanggap dan mampu memenuhi kebutuhan warganya secara cepat dan tepat, masyarakat cenderung merasa diperhatikan, sehingga memperkuat kepercayaan yang diberikan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Mansoor (2021), yang menekankan bahwa kecepatan respons terhadap aduan atau permintaan masyarakat menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pemerintah desa dianggap peduli dan bertanggung jawab terhadap warganya.

Responsivitas yang tinggi mencerminkan adanya komunikasi dua arah yang sehat antara masyarakat dan aparat desa, yang pada akhirnya memperkuat hubungan timbal balik berbasis kepercayaan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kepercayaan masyarakat tidak hanya tumbuh dari seberapa cepat pemerintah desa merespons, melainkan juga dari kualitas respons itu sendiri. Dalam hal ini, penelitian Arfiansyah (2021) menunjukkan bahwa responsivitas yang bersifat formal atau sekadar simbolik tidak cukup untuk membangun kepercayaan yang kuat. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata yang menyentuh persoalan substantif, bukan hanya janji atau tanggapan administratif. Selain itu, Sofyani & Tahar (2021) menyatakan bahwa bentuk tanggapan pemerintah desa yang menyeluruh, transparan, dan disertai tindak lanjut konkret akan lebih berdampak dalam membangun kepercayaan jangka panjang. Oleh karena itu, responsivitas perlu dilihat sebagai bagian dari komitmen etis pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, responsivitas tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa perlu menjaga dan meningkatkan responsivitas agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pengelolaan dana terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Bojong Kulon, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Pertama, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas seharusnya menjadi dasar utama dalam pengelolaan keuangan publik, dalam konteks Desa Bojong Kulon justru menjadi faktor yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena akuntabilitas belum dijalankan secara maksimal, atau belum

dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Kurangnya pelibatan warga dalam proses pertanggungjawaban serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur akuntabilitas dapat menimbulkan persepsi negatif, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan kepada aparat desa.

Kedua, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi yang dijalankan oleh pemerintah desa, terutama terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa, telah meningkatkan rasa percaya masyarakat. Masyarakat merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam proses pembangunan desa, karena adanya kejelasan informasi yang disampaikan secara terbuka. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan, maka semakin besar pula kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah desa.

Ketiga, responsivitas merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling kuat dan positif terhadap kepercayaan masyarakat. Ketanggapan pemerintah desa dalam merespon kebutuhan, keluhan, serta aspirasi warga mencerminkan adanya kepedulian dan keseriusan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Responsivitas yang tinggi mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar terhadap aparat desa dalam mengelola dana dan menjalankan program-program pembangunan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dan responsivitas merupakan faktor kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, sedangkan akuntabilitas harus dikelola secara lebih terbuka dan partisipatif agar dapat berkontribusi positif terhadap kepercayaan publik.

Daftar Pustaka

- Aprilia, I. (2019). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Arwati, R., & Latif, V. (2021). Kepercayaan masyarakat dan tata kelola desa. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Azizah, R., & Kholifah, R. (2023). Analisis transparansi pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 87–96.
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public trust in local government: Evidence from developing countries. *Journal of Public Administration*, 45(1), 112–124.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imawan, R., & Purwanto, W. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 33–45.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352/KMK.07/2024 tentang Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mansoor, M. (2021). Effect of transparency on trust in government institutions: Evidence from village funds. *Governance Review*, 16(3), 55–70.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Mochtar, M., Sahabuddin, R., & Aminah, S. (2022). Responsiveness dalam tata kelola keuangan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 22–31.
- Nordiawan, D. (2010). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Pahlevi, R., Marwan, A., & Wibowo, B. (2022). Pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik*, 5(2), 143–157.
- Peppers, D., & Rogers, M. (2018). Managing customer relationships: A strategic framework. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Prihatin, B., & Mustaqim, M. (2023). Partisipasi masyarakat dan kepercayaan dalam pembangunan desa. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 91–99.
- Sahir, S. H. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif dan aplikasinya dalam ilmu sosial. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Evaluasi pengelolaan dana desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Akuntabilitas*, 14(1), 1–15.

- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widaningrum, A., & Fahrani, R. (2023). Peran responsivitas pemerintah desa dalam peningkatan kepercayaan warga. *Jurnal Administrasi Negara*, 17(2), 75–84.
- WidyaLestari, N. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan implikasinya terhadap trust publik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 6(3), 201–212.

